

**PENGAKUAN PPh ATAS PENGHASILAN USAHA JASA
KONSTRUKSI BESAR PADA PT. BOMA BISMA INDRA
(PERSERO)**

fk

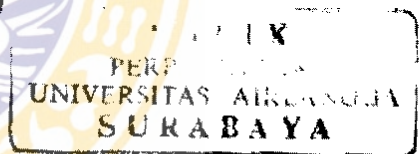
A 201 /02

Gau

P

SKRIPSI

**DIAJUKAN UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN
DALAM MEMPEROLEH GELAR SARJANA EKONOMI
JURUSAN AKUNTANSI**



Diajukan Oleh :

**YOGA GAUTAMA
No. Pokok : 049711801 E**

**KEPADA
FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2002**

Telah disetujui dan siap untuk diuji

Surabaya,17-6-2002

Dosen Pembimbing,



Drs. Heru Tjaraka, MSi, Ak

SKRIPSI

**PENGAKUAN PPh ATAS PENGHASILAN USAHA JASA KONSTRUKSI
BESAR PADA PT. BOMA BISMA INDRA (PERSERO)**

DIAJUKAN OLEH :

YOGA GAUTAMA

No. Pokok : O49711801 E

TELAH DISETUJUI DAN DITERIMA DENGAN BAIK OLEH

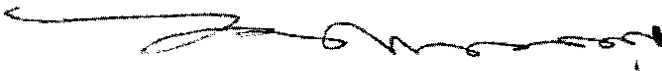
DOSEN PEMBIMBING,



Drs. Heru Tjaraka, MSi, Ak
NIP. 132054304

TANGGAL. 25-7-2002

KETUA PROGRAM STUDI AKUNTANSI



Dr. Arsono Laksmiana, SE, Ak
NIP. 130783542

TANGGAL. 31-7-2002

ABSTRAKSI

Pemerintah Republik Indonesia (Direktorat Jenderal Pajak) telah mengeluarkan peraturan perpajakan yang berkaitan dengan usaha jasa konstruksi besar, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1996, tanggal 20 Desember 1996 juncto Keputusan Menteri Keuangan No. 704 / KMK. 04 / 1996, tanggal 30 Desember 1996 yang kemudian diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 140 Tahun 2000, tanggal 21 Desember 2000 juncto Keputusan Menteri Keuangan No. 559 / KMK. 04 / 2000, tanggal 26 Desember 2000 yang berusaha mendefinisikan usaha jasa kontrak konstruksi serta peraturan perpajakannya secara terperinci dan mulai berlaku tanggal 1 Januari 2001.

Berkenaan dengan perubahan tersebut telah terjadi perbedaan yang sangat mendasar mengenai pengakuan penghasilan atas usaha jasa konstruksi besar. Pada Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1996 juncto Keputusan Menteri Keuangan No. 704 / KMK. 04 / 1996, penghasilan diakui pada saat pembayaran diterima atau disebut *cash basis*, sedangkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 140 Tahun 2000, tanggal 21 Desember 2000 juncto Keputusan Menteri Keuangan No. 559 / KMK. 04 / 2000, tanggal 26 Desember 2000, penghasilan diakui pada saat penyerahan jasa konstruksi atau disebut *acruual basis*.

Dengan adanya perubahan pengakuan penghasilan pada perusahaan jasa konstruksi besar dari metode *cash basis* menjadi metode *acruual basis*, maka timbul permasalahan terhadap pengakuan PPh atas penghasilan usaha jasa konstruksi besar yang dilaksanakan / diserahkan pada tahun 1997 dan tahun – tahun berikutnya sampai dengan tahun 2000, tetapi pembayarannya baru diterima perusahaan (kontraktor) pada tahun 2001 dan atau tahun – tahun sesudahnya.

PT. Boma Bisma Indra (Persero) dalam menghitung Pajak Penghasilan tahun 2001 dari usaha jasa konstruksi hanya memperhitungkan penghasilan dari usaha jasa konstruksi yang dilaksanakan / diserahkan dan dibayar pada tahun 2001. Sedangkan penghasilan yang diterima dalam tahun 2001 yang berasal dari jasa konstruksi yang dilaksanakan / diserahkan pada tahun 2000 tidak diperhitungkan sebagai penghasilan tahun 2001, baik sebagai penghasilan yang dikenakan tarif umum sesuai pasal 17 ayat (1) atau sebagai penghasilan yang dikenakan tarif khusus (final) sesuai pasal 4 ayat (2) Undang - undang Pajak Penghasilan. Di sisi lain potongan PPh pasal 23 tahun 2001 yang diperhitungkan sebagai kredit pajak terhadap PPh terhutang yang dihitung dengan tarif umum adalah seluruh potongan PPh pasal 23 yang diterima perusahaan, baik yang berasal dari potongan PPh pasal 23 atas penghasilan usaha jasa konstruksi yang dilaksanakan / diserahkan dan dibayar tahun 2001 maupun potongan PPh pasal 23 atas penghasilan usaha jasa konstruksi yang dilaksanakan / diserahkan pada tahun 2000 yang pembayarannya baru diterima di tahun 2001. Hal ini tentunya tidak benar, karena pembayaran yang diterima pada tahun 2001 tersebut adalah penghasilan yang sebelumnya belum pernah dikenakan Pajak Penghasilan. Hal ini tentunya akan sangat merugikan perusahaan jika di